

IMPLEMENTATION OF SMART INDONESIA PROGRAMME (PIP) AT SMP NEGERI 11 BANDAR LAMPUNG

By:

Hinfa Mosshananza

Universitas Tulang Bawang (UTB) Lampung

hinfamosshananza@gmail.com

ABSTRACT

Based on Presidential Instruction No. 7 of 2014 on the Implementation of Prosperous Family Savings Programme, Smart Indonesia Programme, and Healthy Indonesia Programme to Build Productive Families. The purpose of this research is to find out the Implementation of the Smart Indonesia Programme Policy in SMP Negeri 11 Bandar Lampung. This research method uses a descriptive qualitative approach. The results showed that the implementation of the Smart Indonesia Programme policy on the aspect of communication in the form of socialization between the Education Office and the School that has been done now is quite effective. The obstacle in communication problems is that there are still student guardians who do not understand the benefits and procedures for proposing to get the help of the Smart Indonesia Programme. In terms of resources both employees and equipment in supporting the Smart Indonesia Programme both in the Education Office and in SMP Negeri 11 Bandar Lampung is adequate, but for some schools, there are still obstacles to the unstable internet network. On the disposition aspect that the implementation of duties and functions of the department and schools related to this Programme has been implemented well to the beneficiaries of the Smart Indonesia Programme in Bandar Lampung City. However, the School's supervision of the use of aid funds by students receiving the Smart Indonesia Programme is still not optimal because the school does not know with certainty the usefulness of the funds used. While aspects of the bureaucratic structure of the implementation of the Smart Indonesia Programme policy have been implemented, but there are also still obstacles, namely the school is still difficult to register students who desperately need the Programme.

Keyword: Implementation, Smart Indonesia Programme

ABSTRAK

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada aspek komunikasi dalam bentuk sosialisasi antara Dinas Pendidikan dengan Sekolah yang telah dilakukan saat ini sudah cukup efektif. Hambatan dalam masalah komunikasi yaitu masih terdapat wali murid yang belum memahami manfaat serta tata cara pengusulannya untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar. Pada aspek sumber daya baik pegawai maupun peralatan dalam mendukung Program Indonesia Pintar baik di Dinas Pendidikan maupun di SMP Negeri 11 Bandar Lampung sudah memadai, namun untuk beberapa sekolah masih terdapat kendala jaringan internet yang tidak stabil. Pada aspek disposisi bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas maupun sekolah terkait program ini telah dilaksanakan dengan baik kepada para penerima manfaat Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung. Namun pengawasan Sekolah terhadap penggunaan dana bantuan oleh siswa penerima Program Indonesia Pintar yang masih belum optimal dikarenakan pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti kegunaan dana tersebut digunakan. Sedangkan aspek struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar telah terlaksana, namun juga masih terdapat kendala yaitu pihak sekolah masih kesulitan untuk mendata siswa-siswa yang sangat membutuhkan program tersebut.

Kata Kunci: Implementasi, Program Indonesia Pintar

PENDAHULUAN

Dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa saat ini tentu tidak lepas dari beberapa kendala, salah satunya kendala dalam biaya pendidikan terutama bagi keluarga kurang mampu. Terbukti di situasi pandemi, banyak anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak sekolah bahkan tidak sedikit yang memilih ikut bekerja membantu orang tua. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu bantuan dari pemerintah berupa sejumlah uang tunai yang diberikan langsung kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin dan memenuhi sekurang-kurangnya satu dari enam kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Program PIP adalah program pemerintah yang merupakan keberlanjutan dari salah satu program- program sosial yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat, yaitu Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah berakhir pada tahun 2003 lalu. Program PIP ini bukan termasuk dalam kategori beasiswa, karena bantuan yang diberikan adalah bantuan langsung tunai yang diberikan kepada siswa-siswi yang termasuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif. Tujuan dari program tersebut adalah untuk membantu siswa miskin untuk memperoleh pendidikan yang layak, mencegah anak putus sekolah, serta untuk memenuhi kebutuhan sekolah mereka.

Nilai dari bantuan yang diberikan akan berbeda setiap jenjang pendidikannya. Para peserta didik SD akan mendapatkan uang sebanyak Rp.450.000, SMP memperoleh Rp.750.000, dan SMA atau SMK dapat Rp.1.000.000 setiap tahunnya. Salah satu sekolah yang menjalankan program ini adalah SMP Negeri 11 Bandar Lampung pada tahun pelajaran 2019/2020 merupakan sekolah yang

sebagian siswanya menerima Program Indonesia Pintar. Siswa menerima Program Indonesia Pintar berjumlah 311 siswa, masing-masing siswa di sekolah tersebut menerima bantuan sebesar Rp.750.000,00 per tahun, dan ada pula Rp.375.000,00 per semester.

Berdasarkan pengamatan peneliti untuk penyaluran PIP tersebut belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari masih ada siswa miskin yang tidak mendapatkan Program Indonesia Pintar dengan alasan dana yang terbatas, dari 960 siswa hanya 311 orang saja yang memperoleh Program Indonesia Pintar. Jika dilihat dari data masyarakat miskin yang ada di SMP Negeri 11 Bandar Lampung, ada 316 siswa tidak mampu yang terdata. Jika dilihat dari 960 siswa yang ada, 316 orang terdata sebagai siswa miskin, namun yang mendapatkan PIP hanya 311 orang maka diketahui masih ada 5 siswa yang belum mendapatkan bantuan PIP ini, hal ini dikarenakan belum transparan dalam menentukan kriteria yang berhak mendapatkan PIP sehingga masih ada pembagian atau penyaluran yang tidak tepat sasaran.

KAJIAN PUSTAKA

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan mendorong pada suatu aktivitas atau kegiatan yang dinamis dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program serta menetapkan tujuan dari kebijakan tersebut. Akhir dari implementasi akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan merupakan langkah lanjutan setelah proses perumusan dan penetapan kebijakan. Dengan demikian pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan- tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari pemerintah, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan (Parmadi, 2018). Lebih lanjut Islamy menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila Tindakan masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau kebijakan dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat (Parmadi, 2018).

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman (2012:70), implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Guntur Setiawan (2014:39) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

b. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar merupakan salah satu program pemerintahan Jokowi-JK yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Indonesia, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 yang diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada situasi yang alamiah (*natural setting*) dan memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang kompleks, dinamis, holistik, penuh makna, dan hubungan gejala bersifat intraktif (*reciprocal*). Peneliti berfungsi sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011:8-9). Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas dan diupayakan

untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga akhirnya dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 11 Bandar Lampung.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel sebagai sumber data dengan secara sengaja dan pertimbangan tertentu agar data yang diperoleh lebih representatif. Pemilihannya disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Misalnya pertimbangan orang yang dianggap paling kompeten tentang kebijakan sosial maka kita harapkan orang yang dimaksud sebagai individu atau penguasa akan memudahkan peneliti untuk mengetahui situasi sosial yang akan diteliti (Sugiyono, 2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung. Peserta didik yang telah mendapatkan dana melalui program ini. Dari hasil penelitian ini selanjutnya peneliti menganalisis secara deskriptif kualitatif sebagai berikut :

Komunikasi

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang diberikan kewenangan dalam meneruskan program pemerintah sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Indonesia Pintar dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Petunjuk Teknis PIP. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik dan pelaksanaannya merupakan kelanjutan program bantuan sebelumnya. Program Indonesia Pintar (PIP) di Kota Bandar Lampung sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang diatur di atasnya seperti

Keputusan Presiden tentang Program Indonesia Pintar (PIP) serta Permendikbud Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar.

Sebagaimana diketahui bahwa Program Indonesia Pintar (PIP) ini sangat baik dan memang terbukti mampu memberikan bantuan kepada keluarga tidak mampu untuk dapat tetap menyekolahkan anaknya hingga jenjang pendidikan menengah. Namun demikian pelaksanaan program ini tidaklah terlepas dari berbagai hambatan dan kendala yang dapat mempengaruhi kesuksesan program tersebut. Salah satu bentuk kendala yang dihadapi yaitu adanya wali murid yang seharusnya mendapatkan program tersebut tetapi ternyata tidak bisa karena kendala administrasi atau bahkan ada keluarga yang seharusnya mampu tetapi justru bisa mendapatkan dana Program Indonesia Pintar (PIP). Kesalahan-kesalahan tersebut tidak terlepas dari beberapa kelemahan antara lain bahwa belum seluruhnya wali murid memahami Program Indonesia Pintar baik dalam hal kegunaan manfaat serta tatacara pengusulannya untuk mendapatkan bantuan program tersebut. Disini peran dari Dinas Pendidikan dan Sekolah hanya sebatas membantu memberikan informasi kepada wali murid untuk dapat mengurusnya di Kelurahan.

Sumber daya

Dalam penelitian ini sumber daya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia atau operator pada sistem Dapodik dan sarana dan prasarana seperti komputer. Aparatur pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung serta tenaga operator yang ada di tiap-tiap sekolah merupakan sumber daya yang mendukung terlaksananya Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung, khususnya di SMP Negeri 11 Bandar Lampung.

Kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana baik berupa perangkat komputer dan jaringan internet untuk mengoperasikan sistem Dapodik di tiap-tiap sekolah juga merupakan faktor pendukung dalam program tersebut. Meskipun tidak semua sekolah mendapatkan jaringan internet stabil, namun kendala tersebut dapat

diatasi salah satunya apabila terjadi kendala maka operator Kota dapat membantu dalam pelaksanaan input data pada sistem Dapodik. Untuk fasilitas di Dinas Pendidikan dan SMP Negeri 11 Bandar Lampung sudah terpenuhi dengan baik, begitu halnya dengan kemampuan sumber daya staf dalam mengoperasikan komputer sudah baik, namun untuk beberapa sekolah mungkin sebagian belum ada jaringan internet yang lancar, mungkin masih dengan menggunakan perangkat *handphone* untuk bisa akses dengan internet.

Disposisi

Disposisi merupakan sikap dan dukungan aparatur dalam melaksanakan kebijakan Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung baik di Dinas Pendidikan maupun sekolah-sekolah yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar ini. Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar pada penelitian ini, adalah bagaimana aparatur baik di Dinas Pendidikan maupun pihak Sekolah memahami substansi kebijakan baik mengenai prosedur dan mekanismenya, sehingga dapat dipahami dan tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap hal-hal yang tertuang dalam kebijakan tersebut.

Disposisi atau sikap merupakan faktor penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dari aspek sikap aparatur terhadap implementasi Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas maupun sekolah terkait program ini telah dilaksanakan dengan baik kepada para penerima manfaat Program Indonesia Pintar di Kota Bandar Lampung. Namun dari hasil penelitian ini juga didapatkan informasi bahwa ada sebagian sekolah yang tidak menyampaikan laporan pencairan dana PIP kepada Dinas Pendidikan seharusnya dikerjakan setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan para orang tua tidak menyampaikan bukti kepada sekolah bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening penerima (siswa) tersebut, sehingga pengawasan sekolah terhadap penggunaan dana bantuan oleh siswa penerima PIP yang masih belum optimal dikarenakan pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti kegunaan dana tersebut digunakan, terutama di situasi pandemi. Hal ini dapat dikatakan juga bahwa

pelaksanaan monitoring dan evaluasi/pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan masih belum optimal.

Kemudian juga sekolah sering dengan sangat terpaksa tidak membuat laporan penggunaan dana karena kesulitan dalam mengumpulkan kuitansi atau bukti penggunaan dana bantuan yang telah digunakan oleh siswa. Sehingga sekolah tidak dapat mengetahui rincian penggunaan dana dari siswa apakah memang digunakan untuk keperluan pendidikan atau hanya digunakan untuk hal lain di luar pendidikan diakibatkan karena tidak adanya kuitansi. Namun dari pihak Sekolah khususnya SMP Negeri 11 Bandar Lampung sudah melakukan tindakan untuk mengantisipasi yaitu melakukan sosialisasi kepada orang tua/wali murid agar dana PIP digunakan untuk kebutuhan siswa/siswi penerima bukan untuk keperluan lain diluar kebutuhan untuk pendidikan anak didiknya. Berdasarkan informasi di atas, dapat disimpulkan bahwa pada aspek disposisi terdapat kendala dalam pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan oleh siswa penerima PIP yang masih belum optimal sehingga pihak sekolah tidak mengetahui dengan pasti kegunaan dana tersebut digunakan.

Struktur birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar berdasarkan aspek struktur birokrasi telah terlaksana, baik itu ditingkat Dinas Pendidikan maupun di SMP Negeri 11 Bandar Lampung. Dinas Pendidikan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam hal Program Indonesia Pintar ini, dalam praktek penyalurannya yaitu pihak Sekolah akan meminta KIP kepada siswa yang telah ditetapkan sebagai penerima, tentunya setelah melalui proses pengajuan untuk mendapatkan KIP, kemudian akan dimasukkan nomor kartu tersebut kedalam sistem Dapodik untuk diketahui oleh Kementerian Pendidikan dan akan diberikan Nomor Rekening untuk pencairan dana.

Alur birokrasi sudah tersusun dengan baik sesuai pedoman yang sudah ada, usulan yang berasal dari data Dapodik dikirimkan ke Kementerian Pendidikan setelah

terverifikasi maka akan diterbitkan SK dari Kementrian, dan Dinas Pendidikan lalu menyampaikan ke sekolah-sekolah penerima PIP kemudian pihak sekolah kembali menyampaikan ke orang tua murid untuk proses pencairan dana bantuan. Bantuan langsung masuk ke rekening masing-masing siswa, sehingga alur birokrasi yang terkait dengan dinas pendidikan hampir dirasakan tidak ada. Untuk menyampaikan informasi baik tahap awal Program Indonesia Pintar maupun setelah memperoleh SK dari Kementerian Pendidikan, pihak sekolah juga telah melakukan sosialisasi dengan memanggil dan mengumpulkan orang tua wali murid untuk diberikan penjelasan dengan cara melakukan sosialisasi lalu mengumpulkan dan mendata bagi siswa/siswi yang memiliki KIP/PKH untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Berdasarkan informasi di atas bahwa, faktor pendukung dalam pelaksanaan kebijakan Program Indonesia Pintar berdasarkan aspek struktur birokrasi telah terlaksana, baik itu ditingkat Dinas Pendidikan maupun di SMP Negeri 11 Bandar Lampung.

Selain itu ada kendala bagi sekolah dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) sehingga tepat sasaran adalah sosialisasi yang tidak dapat tersampaikan kepada wali murid. Hal ini disebabkan karena saat dilakukan sosialisasi wali murid tidak bisa hadir ke sekolah untuk memenuhi undangan sosialisasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi dengan para Kepala Sekolah baik melalui pertemuan di Dinas maupun dengan komunikasi telepon untuk dapat mendata dengan baik dan cermat sehingga sasaran dari program ini adalah orang tua anak yang tidak mampu dapat terakomodir namun tetap dengan aturan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Begitu halnya dengan yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah dengan menyarankan kepada para orang tua murid yang benar-benar tidak mampu dan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, yaitu dengan meminta surat keterangan tidak mampu ke Kantor Kelurahan.

Dapat disimpulkan bahwa aspek birokrasi dalam implementasi Program Indonesia Pintar masih terdapat kendala yaitu pihak sekolah masih kesulitan untuk mendata

siswa-siswa yang benar-benar membutuhkan program tersebut dikarenakan orang tua wali murid pada saat sosialisasi tidak hadir sehingga tidak mendapatkan informasi penuh bagaimana persyaratan dibuat, serta masih kurangnya perhatian Kelurahan dalam mendata warganya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah khususnya Program Indonesia Pintar ini.

KESIMPULAN

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 11 Kota Bandar Lampung berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil kesimpulan di atas penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut :

- a. Berkaitan dengan komunikasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksana dalam program ini dikomunikasikan dengan jelas dan terarah sesuai dengan yang telah diatur. Sedangkan untuk komunikasi ke masyarakat sebagai sasarannya juga perlu diperbanyak lagi dan diperluas lagi sosialisasinya.
- b. Berkaitan dengan sumber daya terutama yang menjadi kendala adalah tidak stabilnya jaringan internet di beberapa sekolah, untuk itu pihak Dinas Pendidikan telah bersedia untuk membantu melalui operator Dinas untuk menginput usulan data penerima ke dalam sistem Dapodik di Dinas Pendidikan.
- c. Berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana dalam pelaksanaan program ini diharapkan Sekolah lebih aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana oleh siswa sehingga pelaporan ke Dinas Pendidikan dapat disusun dengan baik.
- d. Berkaitan dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program ini adalah diharapkan implementor sebagai pemilik kewenangan benar-benar mengetahui kondisi dari penerima manfaat program ini agar yang menerima program ini memang benar-benar siswa yang layak, oleh karena itu sosialisasi dalam program ini harus terus dilakukan secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah:

Parmadi, A. A. N. G (2018). Implementasi Kebijakan Program Rumah Bersubsidi di Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*. 3 (1) : 31 -45. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-Inspiration/article/view/831>

Buku:

Guntur Setiawan, (2014). *Impelemntasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta. Balai Pustaka

Usman Nurdin, (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta. Balai Pustaka.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet